

PENGARUH PENERAPAN BUDAYA DEMOKRASI DI LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP PEMBENTUKAN *CIVIC SKILLS*

(Nisa Fatarina, Holillulloh, M. Mona Adha)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah terhadap pembentukan *civic skills* siswa siswi SMK PGRI 2 tahun pelajaran 2013/2014.

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian seluruh siswa dengan sampel 48 siswa. Teknik pokok menggunakan angket, sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penunjang. Teknik analisis data menggunakan chi kuadrat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontingensi $C = 0,63$ dan koefisien kontingensi $C_{maks} = 0,81$.

Kata kunci: Budaya demokrasi, *civic skills*, penerapan budaya

THE INFLUENCE OF THE APPLICATION OF DEMOCRATIC CULTURE IN THE SCHOOL ON THE ESTABLISHMENT OF CIVIC SKILLS

(Nisa Fatarina, Holilulloh, M. Mona Adha)

ABSTRACT

The research is intended to explain and analyze the influence of the application of democratic culture in the school on the establishment of civic skills students at SMK PGRI 2 years lesson 2013 / 2014. Method in this research is using descriptive quantitative. Subject of research is all the students with sample of 48 students. The main technique is using questionnaire, while interviews and documentation as a supporting technique. Data analysis technique is using chi quadrat. Based on the results of research that has been done it can be known that there are degrees of the clinging, namely by a contingency coefficient $C = 0,63$ and contingency coefficient $C_{maks} = 0,81$.

Keywords: Application of culture, civic skills, culture of democracy

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, ini telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pasal 1 ayat 1 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini diatur juga dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada pasal 1 ayat (1).

Sebagai negara yang beragam etnik, bahasa, agama, budaya, serta kelompok sosial Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Tantangan utama bangsa Indonesia yaitu bagaimana menyatukan perbedaan dalam suatu tatanan masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang demokratis dapat tercipta apabila semua masyarakat dapat mengenal, percaya dan memiliki komitmen satu sama lain.

Indonesia salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, semua elemen bangsa perlu menerapkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata salah satunya melalui pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang demokratis, memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Membentuk warga negara yang demokratis tidak terlepas dari peran guru di sekolah yang mengajarkan siswa-siswinya untuk bersikap demokratis. Seorang guru tidak hanya menyampaikan materi-materi mata pelajaran di kelas tetapi harus dapat memberi contoh penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah karna keterlibatan siswa dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah sangat besar pengaruhnya.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan ke dua setelah pendidikan keluarga menjadi tempat dalam proses penanaman budaya demokrasi bagi penerus bangsa. Sekolah memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya demokrasi di kalangan pelajar. Oleh karena itu, sekolah harus menampilkan budaya demokrasi dalam pengelolaan pendidikannya. Disini siswa akan belajar bagaimana budaya demokrasi itu dapat terwujud dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Di sekolah siswa akan di belajarkan bahwa demokrasi sudah menjadi budaya, berarti nilai-nilai demokrasi sudah menjadi kebiasaan bagi warga negara untuk dilaksanakan. Akan tetapi yang sering terlihat di media masa bahwa warga negara bahkan pemerintah itu sendiri telah melanggar nilai-nilai demokrasi, banyak orang yang kurang menghargai kebebasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, dan supremasi hukum kurang ditegakkan. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita

sendiri, nilai-nilai demokrasi kurang dipraktikkan. Maka dari kasus yang terjadi ini sekolah dapat mengajarkan siswa-siswi agar bisa menjalani nilai-nilai demokrasi dengan baik dan benar agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik, adil, dan jujur.

Faktanya saat ini sekolah juga dapat menciptakan pendidikan demokrasi yang dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa Indonesia, khususnya dikalangan generasi muda. Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif dan membentuk aktualisasi diri mereka. Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokrasi. Sebagai komponen warga negara, pengalaman siswa dalam praktik berdemokrasi dikelas akan sangat berharga bagi proses transformasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sekolah harus menciptakan budaya demokrasi yang terlibat dalam pendidikan atau dalam lingkungan sekolah.

Menciptakan budaya demokrasi yang baik di lingkungan sekolah tidaklah mudah harus di dukung oleh semua warga sekolah, dengan terlaksananya sistem musyawarah di dalam pengambilan keputusan, terbentuknya organisasi-organisasi sekolah, adanya saling menghargai dan menghormati keberadaan individu maupun kelompok di sekolah, dan dukungan sekolah dalam memfasilitasi kegiatan kesiswaan baik dalam kurikuler maupun ekstrakurikuler itu merupakan contoh sikap budaya demokrasi yang baik di lingkungan sekolah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK PGRI 2 Bandar Lampung masih banyak siswa yang belum mampu melaksanakan budaya demokrasi di sekolah seperti mengemukakan pendapat pada saat belajar, siswa malu mengemukakan pendapat karena adanya rasa malu bertanya yang ada dalam diri siswa. Selain mengemukakan pendapat siswa juga kurang aktif dalam kegiatan organisasi sehingga siswa hanya belajar di dalam kelas tanpa ada pengalaman dalam berorganisasi atau mengikuti kegiatan sekolah, masalah ini menimbulkan siswa tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan disekolah dan siswa menganggap kegiatan berorganisasi di sekolah itu tidak begitu penting.

Siswa harus mempunyai pola pikir bahwa budaya demokrasi itu penting, agar jiwa demokrasinya sejak awal terbentuk, oleh karna itu sekolah harus mengkondisikan suasana sekolah yang demokratis serta menyediakan sarana dan prasarana yang membangun kebiasaan-kebiasaan demokratis di lingkungan siswa. Hal inilah yang akan memotivasi siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, karena kegiatan di sekolah merupakan pengalaman berharga untuk masa depan dalam menjalankan budaya demokrasi di masyarakat.

Upaya membangun sekolah yang demokratis, perlu dipahami bahwa pembentukan kecakapan kewarganegaraan pada siswa sangat diutamakan sehingga siswa dapat memahami arti sesungguhnya tentang demokrasi itu sendiri sehingga siswa dapat

membangun jalannya demokrasi secara benar dan menjadi warga negara yang baik. Salah satu sikap dari warga negara yang baik yaitu dengan memiliki pengetahuan sikap demokrasi. Sebagai warga negara yang baik atau sering disebut *to be good citizenship*, yaitu warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu warga negara yang baik perlu diberi pengetahuan dan pengalaman berwarganegara yang baik agar dapat memiliki kecakapan dalam mengaplikasikan sikap demokratisnya di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, hal ini dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan guna menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan dikembangkan berdasarkan pengetahuan kewarganegaraan. Kecakapan kewarganegaraan dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran serta kemampuan siswa agar berprestasi dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif dalam berwarga negara. Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam pembentukan kecakapan kewarganegaraan pada siswa yang nantinya akan menerapkan sikap berwarganegara yang baik.

Kegiatan budaya demokrasi dapat terbentuk karena adanya pembelajaran di kelas, organisasi, aktivitas di sekolah, dan dari diri siswa sendiri. Dengan demikian data tersebut menunjukkan sikap budaya demokrasi yang rendah dimiliki oleh siswa-siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. Hal itu dapat dilihat dari beberapa faktor yang diduga penulis sangat mempengaruhi penyebab rendahnya kecakapan kewarganegaraan pada siswa diantaranya kurangnya minat siswa dalam materi budaya demokrasi hal ini terlihat pada siswa yang tidak menerapkan budaya demokrasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat seharusnya guru PKn harus menekankan bahwasanya materi budaya demokrasi tidak sekedar materi yang diberikan di kelas melainkan harus dicontohkan serta diterapkan di lingkungan sekolah, intelektual siswa yang rendah dan kurangnya partisipasi dalam berorganisasi.

Berdasarkan dari kehidupan sehari-hari sekolah merupakan tonggak dasar penanaman budaya demokrasi yang paling berperan karena di sekolah siswa dapat bertemu dengan berbagai macam pikiran, watak, karakter, budaya dan agama. Setiap guru pasti mengharapkan siswa agar mampu melakukan budaya demokrasi pada saat belajar di kelas, beraktivitas di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan

Sekolah Terhadap Pembentukan *Civic Skills* Siswa-Siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung”.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah terhadap pembentukan *civic skills* siswa siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Budaya Demokrasi Di Lingkungan Sekolah

Salah satu keunikan dan keunggulan sebuah sekolah adalah memiliki budaya sekolah yang kokoh dan tetap eksis. Perpaduan semua unsur baik siswa, guru dan orang tua yang berkerjasama dalam menciptakan komunitas yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, menjadikan sebuah sekolah unggul dan favorit di masyarakat.

Menurut Handoko (2007:16) implikasi yang mendasar dari budaya demokrasi, bahwa kehadiran dan keberadaan siswa sebagai salah satu komponen sekolah hanya akan diterima, apabila yang bersangkutan mau, mampu, dan bersedia melakukan berbagai jenis penyesuaian dalam tindakan dan perilakunya mencerminkan penerimaan terhadap budaya demokrasi sesuai dengan tujuan program-program sekolah.

Sebuah sekolah harus mempunyai misi menciptakan budaya sekolah yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, terintegratif, dan dedikatif terhadap pencapaian visi, menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya dan mempunyai karakter takwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja keras, toleran dan cakap dalam memimpin, serta menjawab tantangan akan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang dapat berperan dalam perkembangan iptek dan berlandaskan imtak.

Budaya demokrasi bersifat intangible (tidak dapat diraba) karena tidak dapat dilihat atau disentuhnya, tetapi ada dan dapat dirasakan manfaatnya seperti udara dalam ruangan. Budaya melingkungi dan memengaruhi apa saja yang terjadi dalam lingkungan. Budaya merupakan sebuah konsep sistem yang dinamis, sehingga dapat dipengaruhi oleh apa saja yang terjadi dalam sebuah organisasi.

Selain budaya di sekolah ada kata lain untuk mengembangkan diri siswa yaitu dalam kegiatan berdemokrasi di sekolah. Siswa dapat belajar hidup berdemokrasi di dalam lingkungan sekolah, karna pengembangan ini sangat penting di dapat oleh siswa karena budaya demokrasi adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh

masyarakat Indonesia dalam kegiatan berpolitik. Di dalam kegiatan ini siswa harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik yang ada di sekolah. Contohnya seperti dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS dan siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.

***Civic Skills* (Kecakapan Kewarganegaraan)**

1. Civic Skills (Kecakapan Kewarganegaraan)

Kecakapan kewarganegaraan merupakan suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan kewarganegaraan yang telah dikuasai warga negara. Dalam masyarakat demokratis warga negara hendaknya mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakannya, disamping hak-hak yang diperolehnya. Dengan demikian terdapat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Kecakapan kewarganegaraan dalam hal ini meliputi kecakapan intelektual serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai masalah warga negara.

“*Life skills* atau keterampilan hidup dalam pengertian ini mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat.” *Life skills* merupakan kemampuan yang diperlukan sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan berpikir yang kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan membangun kerjasama, melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja”.

Civic education Winataputra (2007: 1) secara umum menunjuk pada “...*the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure*”, seperti civics di kelas sembilan dan “*problems of democracy*” di kelas 12. Dalam posisi ini “civic education” diperlakukan sebagai “...*the foundational course work in school* yang dirancang untuk mempersiapkan ...*young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Hal itu mengandung makna bahwa “*civic education*” merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa.

Komponen esensial kedua *civic education* dalam masyarakat demokratis adalah kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). Jika warga negara mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan induk, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan.

2. *Intelektual Skills* (Kecakapan Intelektual)

Kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah, pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan dan lebih diarahkan kepada kecakapan berpikir kritis, kreatif tentang berbagai masalah kewarganegaraan.

Branson (1999: 15-16) mengemukakan berikut ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kecakapan intelektual:

Kemampuan intelektual: kata-kata berikut ini sering digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan intelektual:

- a. Mengidentifikasi: untuk mengenali dengan jelas sesuatu yang masih samar yaitu seseorang harus mampu (1) membedakannya dengan yang lain,(2) mengklasifikasikannya dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan,(3) menentukan asal-usulnya.
- b. Mendeskripsikan: untuk mendeskripsikan objek, proses, institusi, fungsi, tujuan, alat dan kualitas yang jelas maupun yang samar. Agar dapat mendeskripsikan, seseorang memerlukan laporan tertulis atau verbal tentang karakteristiknya.
- c. Menjelaskan: untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklarifikasi, atau menerjemahkan sesuatu, seseorang dapat menjelaskan (1) sebab-sebab suatu peristiwa (2) makna dan pentingnya suatu peristiwa atau ide.
- d. Mengevaluasi posisi: untuk menggunakan kriteria atau standar guna membuat keputusan mengenai (1) kekuatan dan kelemahan posisi suatu isu tertentu, (2) tujuan yang dikedepankan posisi itu, atau (3) alat yang dipakai untuk mencapai tujuan itu.
- e. Mengambil sikap/posisi: untuk menggunakan kriteria atau standar guna mencapai suatu posisi seseorang dapat mendorong (1) memilih dari berbagai alternatif pilihan, atau (2) membuat pilihan baru.
- f. Membela posisi: untuk (1) mengemukakan argumen atas sikap yang diambil dan (2) merespon argumentasi yang tidak disepakati.

3. *Partisipatoris Skills* (Kecakapan Partisipasi)

Di samping mensaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dalam masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society*. Kecakapan-kecakapan tadi itu, dapat dikategorikan sebagai interaksi (*interacting*), memonitoring (*monitoring*), dan mempengaruhi (*influencing*). Interaksi berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.

Branson (1998: 15-16) mengemukakan mengenai kata-kata untuk lebih memahami mengenai kecakapan intelektual. Berikut ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kecakapan partisipatoris:

Kemampuan partisipatoris:

- a. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan dengan bekerjasama dengan yang lain.
- b. Memaparkan dengan gamblang suatu masalah yang penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan.
- c. Membangun koalisi, negosiasi, kompromi, dan mencari konsensus.
- d. Mengelola konflik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji pengaruh antar variabel-variabel yang akan diteliti dengan menggunakan metode deskriptif. Uji pengaruh sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi serta memegang peranan penting dalam penelitian ilmiah.

Sample dalam penelitian ini adalah siswa siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 48 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara, dan teknik observasi. Angket sebelum digunakan dilakukan uji reliabilitas. Teknik analisa data menggunakan korelasi produk moment dengan kriteria uji sebagai berikut:

- a. Jika X^2 hitung lebih besar atau sama dengan X^2 tabel dengan tarif signifikan 5 % maka hipotesis diterima.
- b. Jika X^2 hitung lebih kecil atau sama dengan X^2 tabel dengan tarif signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyajian Data

Penyajian data Pengaruh Penerapan Budaya Demokrasi Di Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan *Civic Skills* Siswa Siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014, dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Pada indikator pelaksanaan program, sebanyak 29 responden (60%), menyatakan kategori kurang terlaksanaan, ini artinya program-program yang ada di lingkungan sekolah kurang terlaksana secara maksimal oleh sekolah.

2. Pada indikator target kelompok, sebanyak 39 responden (81%) menyatakan kategori tercapai, hal ini berarti sekolah sudah mencapai target untuk memberikan manfaat pada siswa dari diterapkannya budaya demokrasi di lingkungan sekolah.
3. Pada indikator *responsibility*, sebanyak 29 responden (60%) menyatakan kategori bertanggungjawab, hal ini berarti sekolah bertanggungjawab untuk membangun budaya demokrasi di lingkungan sekolah agar dapat diterapkan dengan baik oleh siswa.
4. Pada indikator *intelektual skills*, sebanyak 27 responden (56%) menyatakan kategori sangat baik, ini artinya siswa mempunyai kecakapan intelektual yang sangat baik dan siswa mampu berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pada indikator *partisipatoris skills*, sebanyak 31 responden (64%) menyatakan kategori kurang baik, hal ini berarti siswa memiliki kecakapan berpartisipasi namun kecakapan berpartisipasi tersebut belum diterapkan secara maksimal oleh siswa.

Pengujian Pengaruh

Berdasarkan hasil pengujian data yang dilakukan maka terdapat tingkat keeratan hubungan pengaruh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah terhadap pembentukan *civic skills* siswa siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus chi kuadrat dimana X^2 hitungan = 32,41 kemudian dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 9 maka diperoleh X^2 tabel = 9,49. Dengan demikian X^2 hitungan lebih besar dari X^2 tabel (X^2 hitung $\geq X^2$ tabel) yaitu $32,41 \geq 9,49$, serta mempunyai derajat keeratan hubungan antara variabel dalam kategori tinggi dengan koefisien kontigensi $C = 0,63$ dan koefisien kontigensi $C_{maks} = 0,81$. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat pada penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah terhadap pembentukan *civic skills* siswa siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis di atas dapat diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontigensi $C = 0,63$ dan koefisien kontigensi $C_{maks} = 0,81$. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat pada penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah terhadap pembentukan *civic skills* siswa siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.

Bahwa pelaksanaan program, target kelompok, dan *responsibility* saling bersinergi/berpengaruh satu sama lain membentuk budaya demokrasi di lingkungan sekolah dengan kata lain pelaksanaan program menjadi pedoman pencapaian target

kelompok yang dalam pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh komponen sekolah meliputi guru dan siswa untuk mewujudkan pembentukan *civic skills*.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah terhadap pembentukan *civic skills* siswa siswi SMK PGRI 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.

Hal ini dapat di lihat berdasarkan pada beberapa indikator mengenai penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah yang meliputi pelaksanaan program, target kelompok dan *responsibility*. Kemudian pada indikator pembentukan *civic skills* yang meliputi indikator *intelektual skills* dan *partisipatoris skills*.

Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada sekolah diharapkan dapat melakukan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan tanggung jawab dengan cara mengkondisikan seluruh kegiatan sekolah kearah budaya demokrasi.
2. Kepada guru diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap kegiatan pembelajaran baik didalam kelas maupun diluar kelas dengan cara menumbuhkan sikap positif siswa dalam proses pembelajaran.
3. Kepada siswa diharapkan mampu melaksanakan semua aturan-aturan sekolah yang mengusung budaya demokrasi baik didalam maupun diluar kelas dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dan menghargai keberadaan sekolah, guru serta teman sebaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson, S Margareth, et.al. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LkiS.
- Handoko. 2007. *Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winataputra, U.S. dan Dasim Budimansyah, 2007. *Civic Education , Koteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: UPI.